

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan praktik pemerintahan di berbagai Negara ditengarai keadaan “Bad Government” ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang membuat negara mengarah kepada kebangkrutan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu konsep baru perihal cara berpemerintahan yang baik dengan dinamakan Good Governanace (Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance, 2008). Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan bahwa good artinya nilai-nilai yang dapat menjunjung tinggi suatu keinginan rakyat serta dapat meningkatkan kemampuan dari masyarakat untuk mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Kemudian governance artinya seluruh dari proses, mekanisme, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat menerangkan kepentingan dari mereka, untuk menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan yang ada diantara mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 menjelaskan arti dari Good Governance merupakan pemerintahan yang mengemban dan akan mempraktikan prinsip-prinsip dari profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, demokrasi, supremasi hukum serta bisa diterima oleh seluruh rakyat. Pada tahun 1997, United Nation Development Programme (UNDP) menerangkan prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan agar dapat melakukan tata pemerintahan yang baik di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi untuk menyajikan informasi bersifat material dan relevan sehingga memudahkan untuk dipahami dan diakses bagi para stakeholders (Ulfah, 2018). Transparansi merupakan satu diantaranya hal yang menjadi dasar dalam proses pengelolaan keuangan maupun pembuatan laporan keuangan dalam proses berjalannya sektor publik. Alasan dari hal ini adalah karena transparansi sangat berkaitan dengan informasi dari sumber daya publik yang diberikan

secara terbuka kepada masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan (Mediawati & Maryati, 2012).

Selain transparansi, proses pengelolaan dana suatu organisasi, termasuk yayasan juga membutuhkan penerapan prinsip akuntabilitas. Menurut Endahwati (2014), akuntabilitas merupakan salah satu cara pertanggungjawaban organisasi ataupun penerima amanah atas pengelolaan asal usul sumber daya yang telah diberikan serta diamanatkan dari pemberi amanah. Aspek akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan keuangan suatu organisasi adalah salah satu hal terpenting dan dituntut oleh para stakeholders (Dewi, 2015). Akuntabilitas adalah suatu konsep yang kompleks yang mana lebih sulit untuk diwujudkan dari pada memberantas korupsi (turner dan hulme, 1997). Dengan terwujudnya akuntabilitas adalah tujuan utama dari sebuah reformasi sektor publik. Kemudian tuntutan yang muncul adalah adanya keharusan membuat laporan keuangan eksternal yang bisa menggambarkan kinerja dari lembaga sektor publik. Melalui laporan keuangan yang disusun, *stakeholders* dapat melakukan kegiatan pengawasan terhadap organisasi yang bersangkutan secara terbuka.

Salah satu jenis organisasi sektor publik yakni Yayasan. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang berisi atas harta yang telah dipisahkan serta diperuntukan untuk mewujudkan tujuan tertentu pada bidang sosial, kemanusiaan, serta keagamaan, yang tidak memiliki anggota. Dalam melaksanakan proses aktivitas operasional, yayasan mempunyai sumber pendanaan yang wajib dikelola sebaik mungkin. Berkaitan hal tersebut, pemerintah salah satunya menerbitkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada semua lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah yang sudah menjadi sektor publik, termasuk yayasan. Selain itu dalam menjalankan perannya, yayasan mempunyai landasan hukum yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Undang-Undang ini menjelaskan tentang prinsip dari transparansi dan akuntabilitas serta prinsip nonlaba yang menjadi satu hal mendasar bagi suatu yayasan mengingat bahwa organisasi nonlaba memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi berorientasi laba.

Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia) adalah bagian dari organisasi yang berjalan di bidang sosial, dimana lembaga ini adalah lembaga yang bersifat nonlaba (Priharto, 2020). Sumber dana yang ada difokuskan untuk memberdayakan anak-anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan. Melalui pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dengan pelaporan keuangan yang tepat serta sesuai standar, diharapkan tujuan sosial yang sejak awal telah ditetapkan oleh yayasan dapat tercapai.

Meskipun mempunyai tujuan yang berbeda dengan organisasi yang berorientasi bisnis, organisasi nonlaba termasuk yayasan juga memiliki fungsi dan tujuan untuk membuat laporan keuangan. Terlebih lagi, sebagian besar sumber dana yang didapatkan oleh sebuah yayasan pada umumnya merupakan hasil dari pemberian sumbangan paradonatur. Dengan demikian, donatur juga mengharapkan agar dana yang diberikan dapat dikelola serta dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan berlangsungnya yayasan.

Namun, kenyataannya masih ada saja yayasan yang memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pihak tertentu sehingga kepentingan yayasan malah terabaikan. Seperti dilansir dari Lampost.co, dugaan kasus penggelapan uang yayasan yatim piatu pernah terjadi di Yayasan Temanggung Jaya Abadi pada tahun 2018. Dimana hal tersebut terjadi ketika terdakwa diangkat menjadi staf bendahara yayasan, tugas dari terdakwa adalah menerima pembayaran dari orangtua wali murid, kemudian melaporkan serta menyerahkan secara tunai. Kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki uang serta tidak membuat laporan dan pembukuan dan tidak menyetorkan uang kepada bendahara yayasan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak internal. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dari pihak yayasan terhadap bukti pengelolaan sumber dana yang diberikan maka dibuatlah laporan keuangan.

Dalam membuat laporan keuangan, yayasan pun harus menerapkan beberapa prinsip laporan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yayasan terhadap para donatur. Menurut Dewi (2015), laporan keuangan adalah bentuk dari adanya keterbukaan serta pertanggungjawaban suatu

organisasi. Tanpa adanya laporan keuangan yang transparan serta akuntabel, maka para donatur sangat mungkin untuk meragukan dan mempertanyakan sisi kinerja maupun pertanggungjawaban terhadap dana yang sebelumnya telah diberikan kepada yayasan. Bahkan, donatur dapat beranggapan bahwa sumber dana yang disalurkan tidak dikelola dan digunakan dengan bijak. Hal ini berkaitan pula dengan salah satu *agency theory*, di mana dalam kasus ini yayasan yang berperan sebagai *agent* memiliki informasi lebih, tetapi tidak disampaikan seluruhnya kepada donatur yang berperan sebagai *principal*.

Penyajian laporan keuangan dalam yayasan disesuaikan dengan ISAK Nomor 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK Nomor 35 mengatur mengenai penyajian atau pembuatan laporan keuangan organisasi yang berorientasi nonlaba. Menurut peraturan standar yang diterbitkan di dalam ISAK Nomor 35, penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba harus mencakup beberapa unsur yang telah ditetapkan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada lembaga nonlaba, khususnya yayasan yatim dan dhuafa, sebagian besar sudah diberlakukan dengan baik. Ulfa (2018) menyatakan bahwa lembaga Panti Asuhan Al'Maauun, Kabupaten Ponorogo mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan menyusun laporan bulanan rutin yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan, dalam mewujudkan prinsip transparansi, pihak yayasan panti asuhan selalu berupaya untuk memberikan kemudahan akses terhadap siapa saja yang ingin maupun membutuhkan hasil pelaporan keuangan dari pengendalian keuangan panti. Selain itu, Yanuarisa (2020) dalam hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntansi pada organisasi sosial nonlaba, yaitu Yayasan Yusuf Arimatea Palangkaraya, menyatakan bahwa akuntabilitas serta transparansi diterapkan dengan cukup maksimal di yayasan ini.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dalam pengelolaan dana yayasan, selain itu terdapat pada pedoman dasar yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan yayasan dan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan prinsip

transparansi serta akuntabilitas. Terdapat penelitian sebelumnya yang masih menyajikan data berupa pedoman penyajian laporan keuangan lama, yaitu PSAK 45. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pedoman yang terbaru, yaitu ISAK 35. ISAK Nomor 35 menggantikan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang sebelumnya sudah dicabut. Perbedaan antara kedua standar tersebut adalah dilihat dari penyajiannya, secara umum dalam penyajian laporan keuangan bentuk ISAK 35 dan PSAK 45 menurut Gustani (2021) tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan oleh entitas yang dahulunya menyajikan laporan keuangan bentuk PSAK 45, diantaranya yang pertama Klasifikasi Aset Neto, Judul Laporan Keuangan, Laporan Aset Perubahan Aset Neto, dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Berdasarkan hasil penemuan dilapangan, bahwa Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia) masih belum optimal dalam mempraktikan aturan dari pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan Yamesta Indonesia yang ditetapkan

Adapun permasalahan yang didapati dalam pengelolaan keuangan Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia) yaitu: Semula para pengelola yayasan belum mengetahui gambaran dari pengalokasian dana karena tidak adanya gambaran sejak awal untuk apa uang tersebut dikarenakan belum adanya sistem penganggaran dana yang dibentuk. Padahal sangat penting fungsi dari anggaran adalah sebagai alat untuk membantu para pengelola dalam merancang suatu program kerja serta membentuk penganggaran pada setiap tahunnya.

Adapun permasalahan lain yang ditemukan dalam hal penyajian laporan keuangan selama ini bahwa penyusunan dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola keuangan Yamesta Indonesia belum berpedoman pada ISAK No. 35 sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yayasan.

Selanjutnya, pelaporan keuangan Yamesta Indonesia tidak dilaporkan secara berkala. Semula Yamesta Indonesia hanya mempunyai laporan kas keluar dan masuk saja. Pada pedoman dari pengelolaan keuangan setiap pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan dengan benar, kemudian diberitahukan serta dilaporkan

Aida Fitria, 2021

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI YAYASAN MEMBANGUN BERSAMA SEMESTA INDONESIA (YAMESTA INDONESIA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.ac.id]

secara berkala. Sehingga bisa memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan yayasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menilai perlu melakukan pengamatan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana dan penyajian laporan keuangan dalam sebuah yayasan dengan melakukan pembuatan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Berdasarkan kajian diatas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul penelitian **“Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Di Yayasan Yatim Dan Dhuafa”**. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi yayasan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan lebih baik dan maksimal kedepannya.

I.2 Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan permasalahan penelitian pada “Bagaimana pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan dalam organisasi nonlaba khususnya di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia)”, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang meragukan keberadaan dari sebuah Yayasan. Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia) dengan memfokuskan kepada pengelolaan dana berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 serta penerapan dari ISAK No.35 dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan bahwa masalah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia)? Mulai dari proses pendapatan modal, pengelolaan modal, hingga menjaga akuntabilitas dan transparansi dari Yamesta Indonesia.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis buat, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia).

I.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia). Manfaat penelitian ini dilihat dari beberapa aspek:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta kontribusi pada menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia).

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Yayasan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua pihak yang mengelola yayasan, sekaligus dapat menjadi inspirasi bagi Yayasan Yamesta Indonesia untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan yayasan serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk institusi pemerintahan seperti kementerian sosial dan dinas sosial dalam mengurus anak-anak kurang beruntung yang berada di panti asuhan untuk diberikan jaminan terhadap kesejahteraan hidupnya terutama terhadap akses dalam bidang pendidikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu gambaran serta pengetahuan untuk peneliti selanjutnya terutama mengenai keterbukaan dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan di Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia).